



PERUBAHAN RENCANA KERJA TA 2024



**BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata kepada kita semua, sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2024 adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini. Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2024 ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok kedepan.

Arosuka, Juli 2024

KEPALA,



AFRIALDI, SE, MM

NIP. 19750429 199403 1 002

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Solok Tahun 2024.....	11
Tabel 2.2	Capaian Program Perangkat Daerah Sampai juni 2024	20
Tabel 3.1	Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2024	23
Tabel 3.2	Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia Tahun 2024	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya yang disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan perubahan terhadap dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan realisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan ke II. Dokumen Renja Perangkat Daerah mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunannya hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja Perangkat dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh perangkat daerah serta

dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Solok sebagai Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah mengacu kepada Program Nasional dan Propinsi Sumatera Barat dengan hubungan keterkaitan sebagai berikut:

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2024 mempedomani Misi No. 4 Kepala Daerah yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih” dengan rincian:

Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkualitas

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran : Meningkatnya birokrasi yang Kapabel

Indikator : Indeks Profesionalitas ASN

Sedangkan sesuai RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, pada BAB VI tabel 6.3 Program prioritas yang pada BKPSDM adalah “Peningkatan Kualitas SDM ASN” sebagai berikut:

Tujuan 1 : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tata Kelola Pemerintahan

Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keterangan : Pelatihan dan Diklat ASN, serta Beasiswa bagi ASN berprestasi

BKPSDM mempunyai hubungan fungsional dan profesional baik langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ada di pusat, maupun dengan kantor-kantor regional BKN yang tersebar pada dua belas wilayah kerja. Ada sebanyak 7 sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara yang secara keseluruhan masih terdapat permasalahan Pelayanan di BKPSDM sehingga Penyusunan Perubahan Renja tahun 2024 diharapkan dapat mendorong pelayanan BKPSDM agar bisa sejalan dengan sasaran strategis BKN.

Selain itu BKPSDM juga memiliki hubungan fungsional dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan sasaran strategis BKD Propinsi Sumatera Barat “Meningkatnya kualitas pengelolaan Manajemen SDM Aparatur”. Penyusunan perubahan rencana kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2024 diselaraskan dengan sasaran strategis BKD Propinsi Sumatera Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2024 mengacu pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
14. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BKPSDM Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BKPSDM Kabupaten Solok

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2024 selain dimaksudkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Perubahan Kabupaten Solok Tahun 2024 dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi juga sebagai panduan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2024 mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. menjabarkan review rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2024

Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pelaksanaan evaluasi terhadap Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II (sampai dengan bulan Juni 2024) yang menggambarkan kinerja capaian masing-masing program pada Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hasil evaluasi terhadap RKPD akan menjadi acuan dalam menyusun tindak lanjut pada triwulan berikutnya, Dari hasil pelaksanaan evaluasi terhadap RKPD sampai dengan triwulan II, diperoleh permasalahan, faktor pendukung dan Upaya tindak lanjut urusan perangkat daerah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Capaian Renstra SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026. Strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan RENJA tahun bersangkutan dan RPJMD 2021-2026 kabupaten Solok. Indikator kinerja yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya yang dapat memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Evaluasi Program Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok sebesar **Rp.31.784.440.181,-** dengan realiasi keuangan sebesar **Rp. 2.673.896.378,- (8,41%)** dan realisasi fisik sebesar **49,66%** yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 28.708.879.686- Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Tambahan Penghasilan PNS dan realisasinya sebesar Rp. 1.814.457.782 atau 6,32%.
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.897.005.395,- dengan realisasi sebesar Rp.835.938.596,- atau 28,86 %.
- c. Belanja Hibah sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- atau 0 %.
- d. Belanja Modal sebesar Rp. 28.555.100,- dengan realisasi sebesar Rp.23.500.000,- atau 82,30 %.

Adapun rincian target realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah

Indikator Kinerja Program adalah Persentase Penempatan Aparatur sesuai Kompetensi dengan target 72% dan capaian program sampai dengan triwulan II sebesar 55,25%. Sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Indikator Kinerja : Persentase Kesesuaian Formasi dengan ketersediaan PNS

Target: 95%

Realisasi Triwulan II: 57%

b. Mutasi dan Promosi ASN

Indikator Kinerja: Persentase kesesuaian Kompetensi dengan jabatan

Target: 78%

Realisasi Triwulan II: 54%

- c. Pengembangan Kompetensi ASN
Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian
Target: 100%
Realisasi Triwulan II: 60%
 - d. Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur
Indikator Kinerja: Persentase pembinaan dan peningkatan penegakan disiplin aparatur
Target: 100%
Realisasi Triwulan II: 50%
2. Program Pengembangan Sumber Daya manusia
Indikator Kinerja Program adalah Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) dengan target 70% dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 45%. Sedangkan Indikator Kinerja untuk kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Indikator Kinerja: Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional
Target: 100%
Realisasi Triwulan II: 45%
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator Kinerja Program adalah Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan dengan target 100% dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 69,03%. Sedangkan Indikator Kinerja untuk kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja: Cakupan dikumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Target: 100%
Realisasi Triwulan II: 66,67%

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja: Cakupan dokumen keuangan yang tersedia
Target: 100%
Realisasi Triwulan II: 50,00%
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Kinerja: Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Target: 100%
Relisasi Triwulan II: 100%
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja: Persentase terlaksananya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
Target: 100%
Relisasi Triwulan II: 65%
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja: Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah
Target: 100%
Relisasi Triwulan II: 75%
- f. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja: Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik
Target: 100%
Relisasi Triwulan II: 57,50%

Untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagaimana terangkum dalam tabel 2.1 dibawah ini (Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II)

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2024

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Solok BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
NO	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten / kota pada tahun 2026 (akhir tahun RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Solok sampai dengan RKPD tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2024 Yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang di evaluasi Tahun 2024		Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD sd tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	%	%	
					6	7	8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100%		16		
19	Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi					72%	1.128.888.356	20,73%	65.407.930	34,52%	162.916.369	0,00%	-	0%	-	55,25%	228.324.299					BKPSDM
		5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN					95%	599.589.338	23%	9.350.000	34%	88.739.602	0%	-	0%	-	57,00%	98.089.602					
		5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan							25%	-	35%	7.112.500					60,00%	7.112.500					
		5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK							25%	3.600.000	35%	65.435.558	-	-			60,00%	69.035.558					
		5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN							25%	1.030.000	30%	2.246.800					55,00%	3.276.800					
		5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi							0%	-	0%			-			0,00%	-					
		5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian							25%	1.720.000	35%	8.793.600					60,00%	10.513.600					
		5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian							15%	3.000.000	35%	5.151.144					50,00%	8.151.144					

	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan					78%	198.736.780	26%	46.501.130	28,33%	55.780.888	0,00%	-	0%	-	54,00%	102.282.018				
	5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah							20%	3.307.500	20%	18.042.044					40,00%	21.349.544				
	5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN							22%	6.689.530	38%	2.027.500					60,00%	8.717.030				
	5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN							35%	36.504.100	27%	35.711.344					62,00%	72.215.444				
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian					100%	235.691.050	13,00%	-	0,47	5.335.000	0%	-	0%	-	60%	5.335.000				
	5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan							0%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-				
	5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir							13%	-	47%	5.335.000		-			60,00%	5.335.000				

		5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pembinaan terhadap Aparatur				100%	94.871.188	21,25%	9.556.800	28,75%	13.060.879	0,00%	-	0%	-	50,00%	22.617.679				
		5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						30%	-	25%	4.059.735					55,00%	4.059.735				
		5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan						10%		40%						50,00%	-				
		5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						20%	9.556.800	35%	9.001.144					55,00%	18.557.944				
		5.03.02.1.04.09	Pelayanan proses izin perceraian	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani						25%	-	15%						40,00%	-				
19	Sasaran 2 : Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan sesuai kebutuhan	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				70%	1.529.217.195	30%	38.907.500	15,00%	410.656.500	0,00%	0	0%	0	45,00%	449.564.000				
		5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis				100%	-	0%	0	0	-	0	-	-	-	0,00%	-				
		5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, lnti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi						0%	-		-	-	-	-	-	0,00%	-				

		5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				100%	1.529.217.195	30%	38.907.500	15%	410.656.500	0%	-	0%		45%	449.564.000				
		5.04.02.1.02.01	Penyusunan kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				0%		-	-	-	-	-	-			0,00%	-				
		5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				0%		-	-	-	-	-	-			0,00%	-				
		5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				30%	38.907.500	15%	410.656.500							45,00%	449.564.000				

	5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan					0%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-				
Sasaran 3 : Meningkatnya tata kelola organisasi	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan			100%	29.126.334.630	29%	418.612.216	1703,65%	1.577.395.863	0,00%	0	0%	69,03%	1.996.008.079				
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran			100%	136.550.363	63,75%	19.287.500	36,25%	44.057.676	0,00%	-	0%	-	66,67%	63.345.176			
	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah					50%		40%	2.579.700		-		90,00%	2.579.700				
	5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD					90%	-	7%	2.961.000		-		97,00%	2.961.000				
	5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen					0%	-	15%	-		-		15,00%	-				
	5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD					90%	-	8%	1.029.600		-		98,00%	1.029.600				

	5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen					0%	-		-	-	-	0,00%	-					
	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					25%	19.287.500	25%	36.836.076			50,00%	56.123.576					
	5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0%	-	50%	651.300		-	50,00%	651.300					
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan dokumen keuangan yang tersedia				100%	28.641.519.936	25%	358.712.913	12,50%	1.428.744.869	0,00%	-	0%	-	50,00%	1.787.457.782		
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					25%	358.712.913	25%	1.428.744.869			50,00%	1.787.457.782					
	5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					0%	-	0%	-	-	-	0,00%	-					
	5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0%	-	0%	-			0,00%	-					
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100%	27.000.000	0%	-	50%	10.000.000	0%	-	0%	-	100%	10.000.000		
	5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					0%	-	100%	10.000.000		-	100,00%	10.000.000					

	5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0%	-		-					0,00%	-				
	5.03.01.2.05.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0%	-		-	-	-			0,00%	-				
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran Daerah				100%	76.812.476	38,33%	10.450.000	29,00%	21.159.200	0,00%	-	0%	-	65,00%	31.609.200			
	5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					0%	-		-	-				0,00%	-				
	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Persediaan Kantor yang Disediakan					50%	7.800.000	50%	15.700.000					100,00%	23.500.000				
	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					25%	-	25%	2.761.600					50,00%	2.761.600				
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					25%	-	25%	1.667.600					50,00%	1.667.600				
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi					15%	2.650.000	45%	1.030.000					60,00%	3.680.000				
		Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0%	-		-	-				0,00%	-				

	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Urusan penunjang Pemerintah Daerah					100%	22.254.615	25%	3.441.803	10025%	4.131.436	0%	-	0%	-	75,00%	7.573.239				
	5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat							0%	-	100,00	1.000.000					100,00%	1.000.000				
	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komusikasi, Sumber Daya Air dan listrik							25%	3.441.803	25%	3.131.436					50,00%	6.573.239				
	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayana Umum Kanotr yg disediakan							0%	-		-	-	-			0,00%	-				
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi dengan baik					100%	222.197.240	22,92%	26.720.000	69,17%	69.302.682	0,00%	-	0%	-	57,50%	96.022.682				
	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							25%	15.495.000	35%	41.217.894					60,00%	56.712.894				
	5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							25%	637.500	25%	16.435.000					50,00%	17.072.500				
	5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi							25%	10.587.500	35%	10.189.788					60,00%	20.777.288				

5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi						16,67%	-	43,33%	1.460.000					60,00%	1.460.000					
							31.784.440.181	522.927.646												Rp2.673.896.378		
							Rata-rata capaian kinerja (%)	26,63%	1,57%	584,39%	6,46%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	56,43%	8,04%					
							Predikat kinerja	Sangat Rendah							Rendah	Sangat Rendah						

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : -Pelaksanaan Kegiatan sesuai Rak yang sudah ditetapkan
 -Komitmen pimpinan untuk meningkatkan Indeks Sistem Merit
 -Komitmen Pimpinan untuk meningkatkan IP ASN

Faktor Penghambat keberhasilan kinerja : -Gaji PPPK masih berada di BKPSDM sementara proses pengadaan PPPK tergantung dari banyak faktor
 - Proses e-katalog dan kontrak yang memakan waktu

Tindak lanjut yang di perlukan pada Tahun berikutnya : - Melakukan pendataan yang komprehensif terkait PNS yang sudah melaksanakan diklat baik Fungsional, Teknis, Kepemimpinan
 - Melaksanakan langkah dan prosedur agar proses pengadaan PPPK dapat terealisasi di tahun berjalan
 -Koordinasi intensif dengan Bagian PBJ terkait e-katalog dan Kontrak kegiatan

Skala nilai Kinerja Perangkat Daerah			
No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval Nilai Realisasi Kinerja s/d TW II
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90 %
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Disusun oleh
 Arosuka, Juli 2024
 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Kabupaten Solok

Dievaluasi oleh
 Arosuka, tanggal

AFRIALDI, SE, MM
 NIP. 19750429 199403 1 002

Ir. DESMALIA RAMADHANUR
 NIP. 19671203 199403 2 003

Peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 3 Program pada Tahun 2024 dengan Anggaran sebesar Rp.31.784.440.181,- dan realisasi pada Triwulan II sebesar Rp.2.673.896.378,- Rata-rata kinerja Program SKPD adalah sebesar 49,66%.

Berikut factor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia:

A. Faktor Pendukung

1. Telah dilaksankannya kegiatan sesuai RAK yang sudah disusun awal tahun
2. Komitmen pimpinan untuk terus meningkatkan Indeks Sistem Merit
3. Komitmen pimpinan untuk serius meningkatkan IP ASN

B. Faktor Penghambat

1. Untuk Sub Kegiatan Pendidikan Lanjutan ASN belum tersedianya perbub tentang pemberian beasiswa S2 dan S3
2. Proses e-katalog dan kontrak yang memakan waktu
3. Rendahnya kesadaran ASN untuk mengupload bukti pengembangan kompetensi ke aplikasi SIMPEG dan SI-ASN
4. Sinkronisasi SIMPEG ke SI-ASN masih dalam proses
5. Pada sub kegiatan penyediaan komponen instalasai listrik/ penerangan bangunan kantor harga e-katalog berada diatas harga DPA
6. Alokasi Gaji PPPK sudah dianggarkan pada BKPSDM sementara proses pengadaan PPPK sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor eksternal dan kebijakan nasional

C. Upaya Tindak Lanjut

1. Melakukan pergeseran dana pada anggaran perubahan untuk pengembangan kompetensi ASN
2. Koordinasi intensif dengan Bagian PBJ terkait e-katalog dan Kontrak kegiatan
3. Monitoring dan evaluasi pemutakhiran data pengembangan kompetensi pegawai pada aplikasi SIMPEG dan SI-ASN

4. Memaksimalkan sinkronisasi SIMPEG ke SI-ASN
5. Melakukan pergeseran pada APBD Perubahan Tahun 2024 sesuai kebutuhan organisasi
6. Melaksanakan langkah dan prosedur sesuai aturan agar proses pengadaan PPPK dapat terealisasi di tahun berjalan sehingga anggaran gaji PPPK bisa teralisasi

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan Pembangunan yang baik harus ada keselarasan antara capaian indikator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan yang mendukungnya. Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam hal ini mempedomani arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok dan Indikator Kinerja Sasaran serta Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026. Indikator kinerja sasaran dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Pagu Indikatif Penambahan RKPD
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	PAGU INDIKATIF		
			APBD AWAL 2024	PAGU PENAMBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN
1	Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi	72%	1.128.888.356	1.140.888.356	12.000.000
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	70%	1.529.217.195	1.529.217.195	0
3	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	29.126.334.630	29.148.334.630	22.000.000
Jumlah			31.784.440.181	31.818.440.181	34.000.000

Secara lengkap uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif dapat dilihat pada lampiran berikut ini:

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah ini disusun untuk menjadi pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Solok, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Solok.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2024 harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil yang ditargetkan.

Mengingat akan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, akan ada potensi rencana kerja yang sudah tertuang ke dalam Dokumen Renja tidak dapat direalisasikan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi target capaiannya di kemudian hari. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang kedalam Renja, perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat sehingga hasilnya dapat sesuai dengan sasaran yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BKPSDM Kabupaten Solok.

Demikian Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Solok ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat.

Arosuka, Juli 2024

KEPALA



AFRIALDI, SE, MM

NIP. 19750429 199403 1 002